

**LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP)**



**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
SEMESTER 1 TAHUN 2021**

IKHTISAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) berusaha melaksanakan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan membantu program pemerintah dengan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan tujuan pengendalian maka Setjen Wantannas perlu meningkatkan penerapan pengendalian intern secara Integral pada tindakan, program, dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai pemerintah untuk mendapatkan hasil yang maksimal, sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 13 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Setjen Wantannas telah melaksanakan ketentuan dalam Peraturan tersebut.

Proses Penyelenggaraan SPIP Setjen Wantannas Semester 1 Tahun 2021 dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pemanfaatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian berkala dan khusus pengendalian Risiko akan dituangkan pada Laporan Manajemen Risiko Setjen Wantannas.

2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk memberikan Panduan bagi pimpinan dan pegawai Setjen Wantannas untuk melaksanakan Pengendalian Intern Di lingkungan Setjen Wantannas.

Tujuan Penyelenggaraan SPIP Setjen Wantannas yaitu

- 1 Memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif; keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Setjen Wantannas; dan
- 2 Memberikan informasi penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Setjen Wantannas.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meliputi Program dan Kegiatan Setjen Wantannas Semester 1 yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB II
PERENCANAAN PENYELENGGARAAN SPIP
SETJEN WANTANNAS

2.1 Struktur Organisasi, Visi, Misi dan Tujuan Strategis Itjen

A. Struktur Organisasi Setjen Wantannas



B. Visi

Dalam rangka mewujudkan Indonesia maju, Presiden menetapkan visi:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Sesuai dengan Arahan presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 Bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/ Pimpinan Lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi misi Presiden. Untuk itu perumusan visi dan misi Dewan Ketahanan Nasional disusun dengan menyelaraskan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

“Dewan Ketahanan Nasional yang andal, Profesional, Inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri , dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

C. Misi

Dewan Ketahanan Nasional melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden ke: (3) pembangunan yang merata dan keadilan; (5) kemajuan budaya yang memerminkan kepribadian bangsa; (7) perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga; dan (8) pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Dengan uraian :

1. Memberikan dukungan teknis dan Administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada presiden dan wakil presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintah negara;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana lembaga Dewan Ketahanan Nasional.

D. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, Wantannas telah menetapkan beberapa tujuan yang akan di capai dalam 5 Tahun Kedepan. Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketetapan kebijakan dan strategi pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka kelangsungan hidup bangsa dan negara;
2. Terselenggaranya kapasitas pelayanan kelembagaan Wantannas yang efektif dan efisien; dan
3. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk menetapkan ketahanan budaya.

2.2 Tahapan Penyelenggaraan SPIP

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Setjen Wantannas meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

A. Pemahaman

Adalah tahap untuk membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi, dan penyegaran mengenai SPIP. Hal ini sebagai upaya untuk menginternalisasi SPIP agar tetap menjadi bagian yang integral dan menyatu dalam kegiatan pemerintahan, yaitu dengan melibatkan seluruh tingkatan pejabat dan pegawai di Lingkungan Setjen Wantannas. Kegiatan untuk membangun kembali kesadaran, penyamaan persepsi, dan penyegaran, antara lain melalui

a. Sosialisasi

Pelaksanaan Sosialisasi melalui pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) SPIP Setjen Wantannas, Kelompok Pengawasan Internal (Biro PSP), dan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku instansi Pembina penyelenggara SPIP tingkat nasional.

b. Fokus Grup Diskusi (FGD)

Metode pelaksanaan terkait membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi dan penyegaran mengenai SPIP adalah dengan menyelenggarakan diskusi kelompok atau FGD. Satgas SPIP di lingkungan Setjen Wantannas menjadi fasilitator dalam diskusi dengan tugas menyiapkan materi diskusi yang diupayakan ke arah pemahaman atas semua unsur SPIP termasuk subunsur, butir-butir, dan hal-hal yang menjadi perhatian dalam diskusi.

B. Pelaksanaan SPIP

a. Pembangunan Infrastuktur (Norming)

Pelaksanaan Norming mengacu pada Analisis Risiko dan Evaluasi Penerapan SPIP dengan Menunjukkan AOI (Area Of Improvement) dan dilakukan dengan menentukan Skala Prioritas. Khusus Analisis Risiko Sudah Di tuangkan pada Laporan Manajemen Risiko Setjen Wantannas.

b. Internalisasi

Internalisasi adalah proses yang dilakukan unit kerja untuk membuat kebijakan dan prosedur menjadi kegiatan operational sehari-hari yang di taati oleh seluruh pejabat dan pegawai. Proses ini dilakukan organisasi untuk membuat kebijakan, prosedur, dan pedoman yang sudah dibangun dan terintegrasi dalam kegiatan organisasi.

c. Pengembangan berkelanjutan (Performing)

Tahap ini memanfaatkan hasil proses pemantauan penyelenggaraan SPIP. Kegiatan Pemantauan dilaksanakan oleh Setiap unit Kerja dan dilakukan perbaikan, pemantauan dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut audit.

C. Pelaporan

Dalam rangka pengadministrasian Kegiatan SPIP disusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, maka Satgas SPI Kementerian Kelautan dan Perikanan, SPIP Setjen Wantannas menyusun:

- a. Uraian singkat dari laporan penyelenggaraan SPIP yang telah dilaksanakan.
- b. Efektifitas dan hambatan dan saran perbaikan untuk mengatasi hambatan tersebut .
- c. Tindak lanjut atas pelaksanaan saran perbaikan penyelenggaraan SPIP yang di muat Tahun Sebelumnya

D. Evaluasi

Evaluasi penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk menentukan dan menetapkan Output yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan tahapan penyelenggaraan SPIP;

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP SETJEN WANTANNAS

3.1 Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Setjen Wantannas

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 13 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan, serta Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 12 tahun 2020 tentang Satuan tugas Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Semester 1 Tahun 2021 Setjen Wantannas merencanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DIPA/RKA-KL dengan total pagu anggaran sebesar Rp 48.006.092.000,- Dari pagu tersebut dapat dijelaskan secara singkat mengenai realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam tabel. Realisasi Anggaran Semester 1 TA. 2021

NO.	PAGU	REALISASI	JUMLAH DIREVISI	SISA
1	48.006.092.000	20.748.523.052	Revisi Tiga	Rp 27.257.568.948

Sumber : OMSPAN Kemenkeu

3.2 Fokus Pelaksanaan SPIP Lingkup Setjen Wantannas

Pelaksanaan SPIP di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional fokus dalam menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3.3 Pembentukan Satgas SPIP Lingkup Setjen Wantannas

Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 12 tahun 2020 tentang Satuan Tugas Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. (Terlampir).

3.3 Pembentukan Satgas SPIP Lingkup Setjen Wantannas

Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 12 tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. (Terlampir).

3.4 Hambatan, Rencana Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut Pemecahan

Masalah

A. Aspek Perencanaan

1. Permasalahan yang terjadi dalam aspek Perencanaan adalah sebagai berikut:

PERMASALAHAN	PENYEBAB
pengajuan revisi tidak terjadwal dan tidak disertai data dukung	Tidak Ada Informasi yang jelas tentang jadwal Revisi dan data data yang diperlukan

2. Pengendalian Intern

Kegiatan terkait dengan pengendalian intern bidang perencanaan antara lain:

PERMASALAHAN	UPAYA PENGENDALIAN
pengajuan revisi tidak terjadwal dan tidak disertai data dukung	Sosialisasi tata cara revisi anggaran yang berlaku di kementerian dan Lembaga

3. Tindak Lanjut Pemecahan Masalah

HAMBATAN	PEMECAHAN MASALAH	TINDAK LANJUT
Sosialisasi kurang efektif apabila tidak ada Kebijakan yang dijadikan dasar/pedoman dalam mendukung kegiatan revisi Anggaran di Setjen Wantannas	Menyusun pedoman terkait tata cara revisi anggaran yang memuat Jadwal dan Dokumen yang diperlukan agar di tindaklanjuti oleh unit setjen wantannas	Surat Edaran terkait tata cara revisi anggaran di Lingkungan Setjen Wantannas

B. Aspek Pengelolaan Keuangan

1. Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan

Secara umum, permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran khususnya terkait keuangan, Beberapa masalah yang terjadi diantaranya

antara lain :

PERMASALAHAN	PENYEBAB
Keterlambatan Pendokumentasian Administrasi SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) pada unit Verivikasi Biro Keuangan	Adanya proses panjang pengajuan SPJ dari Unit, KPA PPK dan unit verivikasi

2. Pengendalian Intern

PERMASALAHAN	UPAYA PENGENDALIAN
Keterlambatan Pendokumentasian Administrasi SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) pada unit Verivikasi Biro Keuangan	Menyusun laporan surat masuk dan keluar Surat Pengajuan Pertanggungjawaban (SPJ) di unit Verivikasi

3. Tindak Lanjut Pemecahan Masalah

Kegiatan pengendalian intern yang dilakukan dibidang keuangan harus dimonitor dan evaluasi pelaksanaannya agar efektif dalam pencapaian outputnya. Beberapa kegiatan pengendalian intern yang telah dilakukan mampu mengurangi risiko dan permasalahan yang terjadi. Secara umum, Setjen Wantannas telah melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengendalian intern yang telah dilakukan. Walaupun tidak secara keseluruhan dapat menghilangkan permasalahan yang timbul, namun setidaknya dapat mengurangi risiko dan permasalahan yang ada. Hasil monev atas kegiatan pengendalian intern yang dilaksanakan dan hasilnya tersaji pada Tabel berikut :

HAMBATAN	PEMECAHAN MASALAH	TINDAK LANJUT
SPJ menjadi lebih lama dalam pencairan kegiatan dikarenakan penyesuaian Format dan pengarsipan di unit verivikasi	Dibantu Oleh Unit Kearsipan Pusat dalam membuat Format Arsip di unit Keuangan	Penyempurnaan Laporan Surat Masuk dan Keluar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di unit verivikasi

C. Aspek Barang Milik Negara (BMN)

1. Permasalahan yang terjadi dalam aspek Barang Milik Negara (BMN) adalah sebagaiberikut :

PERMASALAHAN	PENYEBAB
Peminjaman Kendaraan Dinas Operasional saling tumpang tindih antar unit di Setjen Wantannas	Belum mempunyai Kebijakan dan pencatatan terkait Peminjaman Kendaraan Dinas Operasional Kantor

2. Pengendalian Intern

PERMASALAHAN	UPAYA PENGENDALIAN
Peminjaman Kendaraan Dinas Operasional saling tumpang tindih antar unit Setjen Wantannas	Menyusun Kebijakan yang mengatur Pengadaan Peminjaman Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setjen Wantannas

3. Tindak Lanjut Pemecahan Masalah

HAMBATAN	PEMECAHAN MASALAH	TINDAK LANJUT
Belum ada tata cara peminjaman dan pengembalian serta pencatatan kepada pengelola pengadaan barang dan jasa	Menyusun SOP yang mengatur tentang tata cara peminjaman kendaraan dinas operasional kantor	Draft SOP tata cara peminjaman kendaraan dinas operasional kantor

D. Aspek Ketaatan Peraturan Perundang undangan

1. Permasalahan yang terjadi dalam aspek Kepatuhan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

PERMASALAHAN	PENYEBAB
Implementasi tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan belum dilaksanakan sepenuhnya	Belum ada aksi di setiap unit untuk melakukan pengendalian intern terhadap konflik kepentingan

2. Pengendalian Intern

PERMASALAHAN	UPAYA PENGENDALIAN
Implementasi tentang Pedoman Benturan Kepentingan belum dilaksanakan sepenuhnya	Unit Pengawasan di Setjen Wantannas Mengirimkan Nota Dinas kesemua unit untuk menindaklanjuti dan memantau implementasi pedoman benturan Kepentingan di setiap unit

3. Tindak Lanjut Pemecahan Masalah

HAMBATAN	PEMECAHAN MASALAH	TINDAK LANJUT
Beberapa Unit masih belum memahami Implementasi atas Pedoman Benrutan Kepentingan	Melakukan sosialisasi dan asistensi terhadap unit yang belum melakukan kegiatan penanganan benturan kepentingan	Draft Laporan Penanganan Benturan Kepentingan di setiap Unit Setjen Wantannas

BAB IV

EVALUASI DAN KESIMPULAN

4.1 Evaluasi

Hasil Evaluasi untuk Setiap Unsur SPIP di Setjen Wantannas

1. Lingkungan Pengendalian

No	Sub Unsur	Nilai	Tingkat	Penjelasan
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	4	Terkelola dan terukur	Setjen Wantannas sudah melakukan Evaluasi secara berkala melalui Laporan Pelanggaran Disiplin dan Laporan Evaluasi implementasi atas aturan perilaku.
2	Komitmen terhadap Kompetensi	4	Terkelola dan terukur	Setjen Wantannas melakukan Evaluasi secara berkala melalui Laporan Evaluasi Penerapan Standar Kompetensi Jabatan
3	Kepemimpinan yang Kondusif	4	Terkelola dan terukur	Setjen Wantannas melakukan Evaluasi secara berkala melalui Laporan evaluasi pemberlakuan kebijakan/prosedur tentang sistem manajemen kinerja TW 1 s.d I 2021, Laporan Evaluasi SAKIP TA.2020
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	5	Optimum	Setjen Wantannas melakukan Pemantauan berkelanjutan terkait tindak lanjut rekomendasi dari Laporan evaluasi kelembagaan pemerintah Setjen Wantannas tahun 2020 yaitu Dokumen Perpres Pembentukan DKN dan Surat Mensesneg terkait Dewan ketahanan nasional dan juga mengevaluasi kebijakan terkait delegasi wewenang

5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3	Terdefinisi	Setjen Wantannas melakukan Implementasi terkait nota dinas laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan yang didelegasikan dan Laporan Pelaksana Tugas (Plt) dan Laporan Pelaksana Harian (Plh)
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3	Terdefinisi	Setjen Wantannas melakukan Implementasi terkait Laporan/dokumen pelaksanaan rekrutmen pegawai organik Setjen Wantannas, Terakhir tahun 2018
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	4	Terkelola dan terukur	Setjen Wantannas mendukung dan melakukan evaluasi melalui Laporan hasil Audit (TA.2021), Surat Atensi dan Tindak lanjut Organisasi (Laporan Sudah Langsung Ke Sesjen)
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3	Terdefinisi	Setjen Wantannas melakukan Implementasi terkait LPJ Bendahara Bulanan 2021 BA Rekon Data Bulanan 2020 antara Sesjen Wantannas dengan KPPN

2. Penilaian Risiko

No	Sub Unsur	Nilai	Tingkat	Penjelasan
1	Identifikasi Risiko			Setjen Wantannas sudah melakukan pemantauan/evaluasi secara berkala, melalui evaluasi daftar resiko oleh Unit Pengawasan

2	Analisis Risiko			Setjen Wantannas sudah melakukan pemantauan/evaluasi secara berkala, melalui Dokumen RTP (Rencana Tindak Pengendalian) yang di mutakhirkan tahun 2020.
---	-----------------	--	--	--

3. Kegiatan Pengendalian

No	Sub Unsur	Nilai	Tingkat	Penjelasan
1	Reviu Kinerja	5	Optimum	Setjen Wantannas sudah melakukan pemantauan secara berkelanjutan yaitu Laporan Evaluasi belneg dan laporan evaluasi dan kinerja TW 1 TA. 2020 s.d tw 2 TA 2021
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia	4	Terkelola dan terukur	Setjen Wantannas sudah melakukan evaluasi secara berkala yaitu laporan Evaluasi atas penilaian kinerja
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	4	Terkelola dan terukur	Setjen Wantannas sudah melakukan evaluasi melalui Laporan Evaluasi Pengendalian Umum dan Pengendalian Aplikasi (data aplikasi wantannas dan yang sudah dipakai dan blm di pakai)
4	Pengendalian Fisik atas Aset	4	Terkelola dan terukur	Setjen Wantannas sudah melakukan evaluasi melalui Laporan Evaluasi atas Pengamanan BMN (LAPORAN WASDAL) (pengawasan pengendalian) Berita Acara Inventarisasi BMN

5	Penetapan dan Reviu Indikator	3	Terdefinisi	Setjen Wantannas sudah melakukan evaluasi melalui Laporan Hasil evaluasi SAKIP thn 2020 dari menpan, Reviu Lakip
6	Pemisahan Fungsi	5	Optimum	Setjen Wantannas sudah melakukan tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan secara internal dan menerima surat kemenpan RB terkait hasil evaluasi kelembagaan Setjen Wantannas
7	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	3	Terdefinisi	Setjen Wantannas sudah melakukan Implementasi secara berkala melalui penggunaan Disposisi KPA dan PPK terkait Pencairan anggaran
8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	4	Terkelola dan terukur	Setjen Wantannas Sudah melakukan evaluasi melalui Berita Acara Opname 2020 (mengetahui atasan Langsung)
9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	4	Terkelola dan Terukur	Setjen Wantannas Sudah melakukan evaluasi melalui Laporan Evaluasi atas Laporan Mutasi Barang 2020, Laporan Evaluasi atas Daftar BMN 2020, Laporan Evaluasi atas Laporan Keuangan 2020
10	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	5	Optimum	Setjen Wantannas Sudah melakukan Tindak Lanjut atas hasil Laporan evaluasi pemegang BMN, Laporan evaluasi admin simak bmn dan di laporkan ke pimpinan

11	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern	4	Terkelola dan Terukur	Setjen Wantannas Sudah melakukan pemantauan secara berkelanjutan atas Laporan Evaluasi aturan/pedoman/SOP terkait dengan pendokumentasian atas implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting
----	---	---	-----------------------	--

4. Informasi dan Komunikasi

No	Sub Unsur	Nilai	Tingkat	Penjelasan
1	Informasi yang Relevan	4	Terkelola dan Terukur	Setjen Wantannas Sudah melakukan evaluasi melalui Laporan evaluasi program dan kegiatan sistem informasi operasional dan keuangan
2	Komunikasi yang Efektif	4	Terkelola dan Terukur	Setjen Wantannas Sudah melakukan evaluasi melalui Dokumen Laporan Hasil Pemutakhiran Data Kepegawaian dengan BKN

5. Pemantauan Pengendalian Intern

No	Sub Unsur	Nilai	Tingkat	Penjelasan
1	Pemantauan Berkelanjutan	5	Optimal	Setjen Wantannas Sudah melakukan evaluasi melalui unit pengawasan Internal atas pelaksanaan Reviu BMN yang di tindak lanjuti oleh Unit BMN
2	Evaluasi Terpisah	5	Optimum	Setjen Wantannas Sudah melakukan Pemantauan berkelanjutan melalui unit pengawasan Internal atas pelaksanaan Audit TA. 2022 yang di tindak lanjuti oleh Auditan

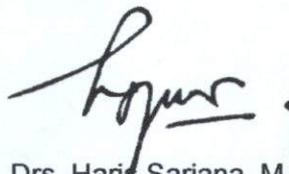
4.2 Kesimpulan

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Setjen Wantannas perlu dioptimalkan, sebagian besar tindak lanjut atas permasalahan telah dilakukan, sebagai upaya dalam peningkatan Sistem Pengendalian Intern perlu komitmen pimpinan dengan seluruh pelaksana dalam mengimplementasikan unsur dalam SPIP, selain daripada itu perlu disusun form pengendalian rutin dalam penyelenggaraan pengendalian rutin antara lain dalam aspek organisasi, aspek perencanaan, aspek pengelolaan keuangan, Aspek BMN (Barang Milik Negara), Aspek Kepatuhan Perundang-Undangan agar kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Demikian laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Si lingkungan Setjen Wantannas Setjen Wantannas untuk mendapat arahan lebih lanjut.

Jakarta, 16 Juli 2021

Ketua Satgas SPIP Setjen
Wantannas



Drs. Haris Sarjana, M.M., M.Tr (Han)
Brigadir Jenderal TNI